

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENYERAPAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA**



Oleh :

Nama: Aucky Nararya Muhammad

No. Mahasiswa: 12312202

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2016

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENYERAPAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII



Nama: Aucky Nararya Muhammad

No. Mahasiswa: 12312202

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2016

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 1 Agustus 2016

Penulis
TERAI
MPEL
K30EADF80892716
6000
RUPIAH
(Aucky Nararya Muhammad)



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENYERAPAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Aucky Nararya Muhammad

No.Mahasiswa: 12312202

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 11/8/2016

Dosen Pembimbing,



Johan Arifin S.E., M.Si. Ph.D

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

Disusun Oleh : **AUCKY NARARYA M**

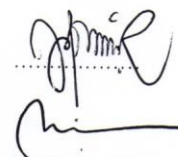
Nomor Mahasiswa : **12312202**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 19 September 2016

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Johan Arifin, SE., M.Si.Ph.D.

Penguji : Isti Rahayu, Dra., M.Si, Ak, Cert, SAP



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta”** dapat berjalan dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam dihaturkan kepada junjungan besar umat Muslim Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau.

Penelitian skripsi ini hanyalah sebuah karya sederhana yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Tujuan pembuatan skripsi adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis hendak memberikan ucapan terimakasih yang tulus kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis selalu diberi kesehatan, kemudahan dan kelancaran selama pembuatan tugas akhir ini.
2. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Widodo Basuki dan Ibu Indrita Riawati Mulyowardhani yang menjadi penyemangat, menjadi motivator, menjadi

anugerah terindah bagi penulis, pelindung, kasih sayang tiada batas, doa yang tiada henti, kesabaran yang tak dapat diukur dan memberikan dukungan bagi penulis,

3. Bapak Dr. Drs. Dwipraptono Agus Harjito, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia,
4. Bapak Dekar Urumsah, S.E., S.Si., M.Com., PhD., selaku ketua jurusan program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,
5. Bapak Johan Arifin S.E.,M.Si. Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi, terimakasih atas segala do'a, motivasi semangat, kesabaran, ilmu, pengalaman, waktu, perhatian dan segala bimbingan serta arahnya kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, ada rasa kebanggaan tersendiri mendapat kesempatan untuk dapat kenal dan dibimbing oleh beliau,
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen, pegawai dan *staff* Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah mencurahkan waktu dan membekali ilmu kepada penulis selama di bangku perkuliahan,
7. Adikku Aisyah Ayu Syifa yang memberikan semangat dan selalu mengingatkan penulis,
8. Seluruh Keluarga Besar tercinta yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan kepada penulis,
9. Sahabat-sahabatku Ayik, Muhaimin, Fauzi, Sani, Manda, Ica, Fida, Nurrokhman dan tentu saja Hilyatina.
10. Keluarga Besar OCB F (khususnya Gamawan, Abel, dan Adika)

11. Teman-teman Jurusan Akuntansi UII angkatan 2012 (khususnya untuk Yufi, Anom, Bayu, Riza) dan semua pihak yang turut serta membantu penulis di segala bidang kehidupan yang tak dapat ditulis satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menerima segala saran dan kritik membangun yang dapat membantu kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Agustus 2016

Penulis,

Aucky Nararya Muhammad



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Berita Acara Ujian Skripsi.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiii
Abstrak	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1. Landasan Teori	9
2.1.1. Anggaran dan Penyerapan Anggaran	9
2.1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran	13
2.1.2.1. Perencanaan	13
2.1.2.2. Administrasi.....	14
2.1.2.3. Dokumen Pengadaan	15
2.1.2.4. Pemahaman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan	17
2.2. Penelitian Terdahulu	18
2.3. Teori Birokrasi.....	21
2.4. Model Penelitian	22

2.5. Hipotesis penelitian.....	23
2.5.1. Perencanaan	23
2.5.2. Administrasi.....	24
2.5.3. Dokumen Pengadaan	25
2.5.4. Pemahaman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	28
3.1. Populasi dan Sampel	28
3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	28
3.3. Indikator Variabel Penelitian	29
3.3.1. Variabel Independen	29
3.3.1.1.Faktor Perencanaan	29
3.3.1.2.Faktor Administrasi.....	29
3.3.1.3.Faktor Dokumen Pengadaan	30
3.3.1.4.Faktor Pemahaman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan	30
3.3.2. Variabel Dependen.....	30
3.4. Metode Analisis Data	31
3.4.1. Uji Validitas	31
3.4.2. Uji Reliabilitas	31
3.4.3. Uji Asumsi Klasik.....	32
3.4.3.1.Uji Normalitas	32
3.4.3.2.Uji Multikolinieritas.....	32
3.4.3.3.Uji Heteroskedastisitas.....	33
3.4.4. Anallisa Regresi Linear Berganda	33
3.4.5. Uji Signifikansi F	34
3.4.6. Uji Koefisien Determinasi	35
3.4.7. Uji Statistik t	35
BAB IV ANALISA DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	36
4.1.Proses dan Hasil Pengumpulan Data.....	36
4.2.Uji Instrumen Penelitian.....	40

4.2.1. Hasil Uji Validitas	40
4.2.2. Hasil Uji Reliabilitas	41
4.3. Uji Asumsi Klasik	42
4.3.1. Uji Normalitas	42
4.3.2. Uji Multikolinearitas	43
4.3.3. Uji Heterokedastisitas.....	44
4.4. Hasil Uji Hipotesis	45
4.4.1. Analisis Regresi Linear Berganda.....	45
4.4.1.1. Uji Simultan (Uji Statistik F)	46
4.4.1.2. Koefisien Determinasi (R^2)	47
4.4.1.3. Uji Parsial (Uji Statistik t).....	48
4.5. Pembahasan Hasil Penelitian.....	50
4.5.1. Pengaruh Perencanaan Terhadap Penyerapan Anggaran	50
4.5.2. Pengaruh Administrasi Terhadap Penyerapan Anggaran	51
4.5.3. Pengaruh Dokumen Pengadaan Terhadap Penyerapan Anggaran	52
4.5.4. Pengaruh Pemahaman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Terhadap Penyerapan Anggaran	53
BAB V PENUTUP	55
5.1. Kesimpulan	55
5.2. Implikasi Penelitian	56
5.2.1. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta	56
5.2.2. Bagi Kalangan Akademisi	56
5.2.3. Bagi Masyarakat Kota Yogyakarta.....	56
5.3. Keterbatasan Penelitian.....	57
5.4. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 4.1 Hasil Pengumpulan Data.....	37
Tabel 4.2 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	38
Tabel 4.3 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	38
Tabel 4.4 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Lama Bekerja	39
Tabel 4.5 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Jabatan.....	39
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas.....	40
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas.....	42
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas	43
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas	44
Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas	44
Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	45
Tabel 4.12 Hasil Uji Statistik F.....	47
Tabel 4.13 Koefisien Determinasi (R^2).....	48
Tabel 4.14 Hasil Uji t.....	49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Model Penelitian	22

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Kuesioner Penelitian
Lampiran 2	:	Daftar Rekapitulasi Jawaban Responden
Lampiran 3	:	Daftar Nama SKPD dan Daftar Informasi Responden
Lampiran 4	:	Hasil Uji Validitas
Lampiran 5	:	Hasil Uji Reliabilitas
Lampiran 6	:	Hasil Uji Asumsi Klasik
Lampiran 7	:	Hasil Analisis Regresi Berganda



ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan bukti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pemerintah, khususnya anggaran pengeluaran/belanja modal (proyek/kegiatan) pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang mempengaruhi perekonomian. Pengeluaran tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa, serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Oleh karena itu diperlukan proses penyerapan anggaran pemerintah yang dinamis, terjadwal dan menyesuaikan prioritas guna mempercepat proses pembangunan dan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi. Sampel penelitian ini adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah Kota Yogyakarta dengan menggunakan metode kuantitatif yang menggunakan kuesioner untuk memperoleh data. Terdapat empat faktor yang diuji, faktor tersebut terdiri dari: Faktor Perencanaan, Faktor Administrasi, Faktor Dokumen Pengadaan serta Faktor Pemahaman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan. Uji analisis dalam penelitian ini menggunakan Regresi Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor Perencanaan, Faktor Administrasi, Faktor Dokumen Pengadaan serta Faktor Pemahaman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Kata Kunci: Penyerapan Anggaran, Anggaran Daerah

ABSTRACT

The purpose of this research is to collect evidence of all factors which are affecting the absorption of government's budgets, especially in the expenses of local budgets. Government's expenses are one of fiscal-policy instrument that is affecting economic matters. These expenses are all spent to provide goods and services and also to complete citizen's need that can't be provided by the private party. That's why the absorption of government's budget needs to be processed dynamicly, fully scheduled and adjust to priority in order to accelerate the development process and push the economic growth. The sample of this research is Satuan Perangkat Kerja Daerah Kota Yogyakarta. Using the quantitative method, this research also uses questioner to gather all the data. There are four factors which are being tested: planning, administration, procurement of document, comprehension of system, and procedure of financial management. Regression is used in this research. The result shows that planning, administration, procurement of document, comprehension of system and procedure of financial management factor had significantly affected the absorption of budgets.

Keyword: the absorption of government's budgets, local budget

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter. Dalam organisasi sektor publik anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan aktivitas yang penting karena berkaitan dengan proses penentuan alokasi dana untuk setiap program maupun kegiatan (Mahsun, Sulistiyowati, Purwanugraha, 2013: 65).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan juga yang disetujui secara bersama oleh Pemerintah Daerah dan juga DPRD, serta ditetapkan oleh Peraturan Daerah (Permendagri No.13 Thn 2006).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah. Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Klasifikasi belanja daerah dapat didasarkan atas urusan pemerintah dan program atau kegiatan. Sedangkan pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang

akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengeluaran pemerintah yang mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat tercermin dalam belanja operasional. Pelaksanaan belanja operasional tersebut dalam rangka peningkatan pelayanan publik oleh pemerintah, yaitu dalam bentuk kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan transportasi, serta infrastruktur seperti jaringan jalan, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya. Pemerintah harus mengupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan tahun anggaran yang bersangkutan dalam penyusunan APBD.

Setelah penyusunan anggaran, fokus berikutnya adalah bagaimana anggaran tersebut dapat tercapai sesuai target. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, belanja Kementrian dan Lembaga telah menghasilkan pola belanja dengan karakteristik penyerapan yang rendah di semester pertama dan menumpuk pada akhir tahun anggaran berjalan. Pola demikian terjadi di tingkat pemerintah pusat dan daerah, sehingga akan mengganggu rencana kinerja kebijakan APBN terhadap perekonomian secara umum. Di sisi lain, akan berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan yang menjadi sasaran kebijakan fiskal secara khusus. (Siswanto & Rahayu, 2010).

Tahun anggaran 2015, seperti yang diberitakan dalam Kedaulatan Rakyat (2/12/2015), sisa anggaran belanja modal pada APBD seluruh kabupaten/kota di Indonesia diperkirakan sebesar 15%. Dan untuk kota Yogyakarta sendiri terhitung

hingga 29 Desember 2015 kemarin penyerapan anggaran belanja di APBD Kota Yogyakarta 2015 sebesar 84 persen. Penyerapan ini dihitung dari pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang disetor ke Dinas Pajak dan Keuangan Daerah (DPDPK) setempat. Total anggaran belanja di APBD Yogyakarta 2015 mencapai Rp 1,890 triliun. Namun, hingga 29 Desember baru terserap Rp 1,594 triliun. Pada 2014 lalu serapan anggaran hingga habis tahun anggaran mencapai 93 persen (Republika, 2015).

Penyerapan tersebut terlihat besar, akan tetapi pada november lalu, seperti yang diberitakan Hariansib.co, penyerapan anggaran kota Yogyakarta baru mencapai 56 persen yang idealnya adalah 75 hingga 80 persen. Dan bahkan menurut Kedaulatan Rakyat (4/09/2015) pada pertengahan agustus lalu serapan anggaran tercatat hanya 40 persen. Realisasi tersebut masih jauh dari target nasional yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar 60 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa penyerapan anggaran yang terjadi di Kota Yogyakarta mengalami keterlambatan dan penumpukan di akhir tahun. Banyak pihak yang megkhawatirkan bahwa penyerapan anggaran yang lambat akan berdampak pada pelambatan pertumbuhan ekonomi.

Namun hasil evaluasi terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama 2015 dinilai baik. Seperti yang diwartakan Rusqiyati (2016), dari 48 SKPD, sebanyak 46 SKPD memiliki kinerja yang sangat tinggi, 1 SKPD yang tinggi dan hanya 1 SKPD yang masuk kriteria memiliki kinerja rendah. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata penyerapan fisik oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota

Yogyakarta pada tahun anggaran 2015 mencapai 96,86 persen sedangkan penyerapan keuangan mencapai 86,37 persen.

Peneliti tertarik dengan fenomena penyerapan anggaran kota Yogyakarta yang mendapat kategori baik dari hasil evaluasi walaupun tidak maksimal dan terjadi penumpukan anggaran di akhir tahun. Dibandingkan dengan beberapa dengan provinsi dan kota lain, penyerapan anggaran kota Yogyakarta terbilang tinggi dengan rata-rata penyerapan anggaran sebesar 85% dan silpa yang menurun dari Rp 434 miliar di tahun 2014 menjadi 266 miliar pada tahun 2015.

Penelitian mengenai penyerapan anggaran telah banyak dilakukan. Penelitian-penelitian terdahulu dilakukan oleh Herriyanto (2012), Nugroho (2013), Priatno (2013), Shalikhah (2014) dan Putri (2014). Secara umum, faktor-faktor yang berpotensi digunakan dalam penelitian ini berdasarkan penelitian-penelitian tersebut diantaranya perencanaan, sumber daya manusia (SDM), dokumen atau pengadaan barang/jasa, dan administrasi.

Faktor perencanaan yang merupakan salah satu fungsi dari anggaran sebagai alat perencanaan, selain itu dengan perencanaan yang matang pencapaian tujuan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Sedangkan dalam proses penganggaran tidak terlepas dari administrasi karena penganggaran merupakan bagian fungsi dari administrasi yang berkaitan dengan cara merencanakan keuangan, berapa anggaran yang diperlukan, darimana pembiayaannya, perhitungan uang masuk dan keluarnya, pengawasan yang dilakukan, tata usaha, pencatatan dan pembukuan. Faktor dokumen atau pengadaan barang/jasa sangat berpengaruh terhadap daya

serap anggaran. Hal ini terlihat dari proses kualifikasi (baik barang dan jasa), pemilihan dan proses pencairan. Tanpa adanya dokumen pengadaan maka proses pengadaan barang/jasa tidak dapat dilakukan. Dan yang menjadi pembaharuan dalam penelitian ini adalah mengganti faktor SDM dengan faktor pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan. Karena orang yang mengerti sistem dan prosedur pengelolaan keuangan maka dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan untuk menyusun laporan keuangan berpedoman pada prinsip dan standar yang berlaku (Shalikhah, 2014).

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Apakah perencanaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran?
- 2) Apakah administrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran?
- 3) Apakah dokumen pengadaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran?

- 4) Apakah pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perencanaan, administrasi, dokumen pengadaan serta pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan merupakan faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini dapat dijadikan informasi dan bahan referensi mengenai masalah-masalah terkait penyerapan anggaran, secara rinci adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Pemerintah, sebagai masukan dan sumbangsih dalam rangka mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta terutama kaitannya dengan perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran secara efektif dan efisien.
- 2) Bagi Pendidikan Akuntansi, sebagai sumbangsih di bidang Akuntansi Sektor Publik. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang anggaran pemerintahan dan dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

- 3) Bagi Penulis, penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai penyerapan anggaran di sektor publik.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang akan diuraikan secara singkat dan sistematis. Masing masing bab memiliki susunan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Berisi pembahasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam usulan penelitian ini.

Bab II: Kajian Pustaka

Dalam bab ini dijelaskan mengenai kajian pustaka sebagai dasar penelitian ini, berupa landasan teoritis yang digunakan, penjelesan mengenai penyerapan anggaran beserta faktor-faktornya meliputi perencanaan, administrasi, dokumen pengadaan serta pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dilanjutkan dengan uraian penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran yang kemudian dari pembahasan tersebut diformulasikan dalam bentuk hipotesis.

Bab III: Metodologi Penelitian

Dalam bab ini akan dibahas mengenai populasi dan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan.

Bab IV: Analisis Data dan Pembahasan

Pada bab ini menguraikan tentang pengujian data, analisis hasil penelitian berupa pengujian statistik dan pembahasan.

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini menguraikan kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil pengolahan data dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian sejenis di masa yang akan datang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Anggaran dan Penyerapan Anggaran

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter. Dalam organisasi sektor publik anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan aktivitas yang penting karena berkaitan dengan proses penentuan alokasi dana untuk setiap program maupun kegiatan (Mahsun dkk, 2013: 65).

Dalam Kuncoro (2013) penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran. Tahapan penyerapan anggaran ini dimulai ketika Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disahkan oleh DPR. Dalam rangka terjadinya kesatuan pemahaman serta kesatuan langkah dalam pelaksanaan, pemerintah sebagai pelaksana dari UU APBN selanjutnya menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dasar hukum pelaksanaan APBN. Pada saat ini Keppres yang berlaku adalah Keppres nomor 42 tahun 2002.

Anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi, seperti yang diutarakan Mahsun dkk. (2013: 65-67), yaitu:

1) Alat Perencanaan

Dalam fungsinya sebagai alat perencanaan, anggaran digunakan untuk perumusan tujuan dan kebijakan, program, aktivitas, alokasi dana dan sumber pembiayaan, serta indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.

2) Alat pengendalian

Anggaran berfungsi sebagai instrumen yang dapat mengendalikan terjadinya pemborosan pengeluaran. Dengan anggaran yang telah diajukan, pemerintah harus mempertanggungjawabkan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran.

3) Alat Kebijakan Fiskal

Anggaran berfungsi sebagai instrumen yang dapat mencerminkan arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi yang akan mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4) Alat Politik

Anggaran merupakan dokumen politik yang berupa komitmen dan kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik.

5) Alat Koordinasi dan Komunikasi

Sebagai alat koordinasi, anggaran merupakan instrumen untuk melakukan koordinasi antarbagian dalam pemerintahan. Sedangkan fungsinya sebagai alat komunikasi anggaran digunakan untuk mengkomunikasikan antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif.

6) Alat Penilaian Kinerja

Anggaran sektor publik merupakan wujud komitmen dari pihak eksekutif sebagai pemegang anggaran kepada pihak legislatif sebagai pemberi wewenang. Kinerja pihak eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target pencapaian anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

7) Alat Pemotivasi

Anggaran berfungsi untuk memotivasi pihak eksekutif beserta stafnya untuk bekerja ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang ditetapkan.

8) Alat untuk Menciptakan Ruang Publik

Anggaran merupakan wadah untuk menampung aspirasi dari kelompok masyarakat, baik kelompok yang terorganisir maupun tidak terorganisir.

Dengan fungsi-fungsi anggaran tersebut diharapkan anggaran akan terealisasi dengan maksimal untuk mensejahterakan masyarakat. Namun sayangnya selama ini masih saja terjadi keterlambatan penyerapan anggaran khususnya di awal tahun sedangkan di akhir tahun terjadi penumpukan penyerapan anggaran sehingga dapat berakibat dengan tidak tercapainya target anggaran yang telah ditetapkan.

Seperti yang diungkapkan Yustika (2012) dalam Priatno (2013), keterlambatan penyerapan anggaran terjadi akibat beberapa aspek, yaitu:

- 1) Setiap kementerian dan lembaga terlebih dahulu melakukan penelaahan atas perencanaan terkait dengan program dan kegiatan yang terdapat dalam APBN. Penelaahan yang dilakukan tersebut untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan tahun anggaran berjalan. Lambatnya penyerapan anggaran disebabkan karena sebagian proyek/program sejak awal tidak diikuti dengan jadwal yang jelas, ataupun jadwal tersebut hanya sebagai panduan bukan sebagai target pelaksanaan. Selain itu, tidak adanya inisiatif untuk melaksanakan program/proyek yang sudah ditetapkan karena menganggap waktu untuk pelaksanaan anggaran relatif masih lama.
- 2) Adanya proses tender yang memakan waktu lama dalam pelaksanaan program. Setiap program yang berjalan dengan nilai proyek yang besar dan pengerjaan yang rumit, sesuai dengan aturan harus melalui proses tender yang memakan waktu berbulan-bulan, sehingga pelaksanaan program tersebut pada awal tahun belum dapat dimulai. Apabila jumlah perusahaan yang mengikuti tender kurang dari persyaratan maka harus dilakukan tender ulang, dan hal itu akan semakin menghambat pelaksanaan program.
- 3) Terdapat beberapa jenis program/proyek tertentu yang tidak bisa dilaksanakan pada awal tahun. Program-program seperti monitoring dan evaluasi atas program/proyek yang dijalankan pelaksanaannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun. Selain itu juga terdapat kegiatan yang

pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan musim khususnya yang berkaitan dengan pertanian, misalnya subsidi benih dan pupuk yang baru tepat diberikan saat musim tanam sekitar bulan September/Oktober.

Jika kondisi terlambatnya penyerapan anggaran hingga tidak tercapainya target anggaran masih terus terjadi, akan berakibat pertumbuhan ekonomi yang lambat serta hilangnya manfaat belanja. Karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Apabila pengalokasian anggaran dilakukan secara efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis.

2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran

2.1.2.1 Perencanaan

Mardiasmo (2002) Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis dan melibatkan aspek operasional. Dalam hal perencanaan organisasi akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi histories dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku yaitu partisipasi dalam pengembangan system perencanaan, penetapan tujuan dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan.

Menurut Nugroho (2013) kelancaran serta keberhasilan organisasi untuk dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien ditentukan oleh adanya perencanaan yang matang. Perencanaan ini pada dasarnya merupakan salah satu

fungsi dalam manajemen. Apabila manajemen keuangan publik tidak dapat merencanakan anggaran dengan baik, akan berdampak terhadap penyerapan anggaran dan juga kualitas penyediaan barang/jasa yang dihasilkan pemerintah.

Untuk itu, perencanaan dalam menyiapkan anggaran merupakan keharusan bagi setiap organisasi atau perusahaan. Perencanaan anggaran mengungkapkan apa yang akan dilakukan di masa datang dan menjadi proses bagi manajemen untuk berfikir tentang pengintegrasian aktivitas organisasional ke arah tujuan yang berorientasi kesasaran masa mendatang. Secara singkat, seperti yang diutarakan Riswadi (2013) dalam blognya, anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan:

- Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja),
- Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

2.1.2.2 Administrasi

Menurut Hendi Haryadi (2009) terdapat dua pengertian administrasi, yaitu:

1. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lain.
2. Administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan

dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Intinya, administrasi melingkupi seluruh kegiatan, dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sepintas administrasi terlihat sama dengan manajemen, namun kedua hal tersebut berbeda namun tetap berhubungan. Manajemen merupakan proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Sehingga dapat dinyatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi, sebab manajemen berfungsi sebagai alat pelaksana utama dalam kegiatan administrasi (Falkhi, 2014).

Menurut Gullick dalam Hakim (2011) di dalam proses penganggaran tidak terlepas dari administrasi karena penganggaran merupakan bagian fungsi dari administrasi yang berkaitan dengan cara merencanakan keuangan, berapa anggaran yang diperlukan, darimana pembiayaannya, perhitungan uang masuk dan keluarnya, pengawasan yang dilakukan, tata usaha, pencatatan dan pembukuan. Penganggaran adalah fungsi yang berkenaan dengan pengendalian organisasi melalui perencanaan fiskal dan akuntansi.

2.1.2.3 Dokumen Pengadaan

Penyerapan anggaran, khususnya belanja barang dan jasa, memiliki pengaruh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu setiap instansi

pemerintah harus mengatur pengeluarannya agar berjalan lancar dan dapat mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Setiap kegiatan dalam penyediaan barang/jasa yang dimulai dari penyusunan hingga barang/jasa tersebut dapat digunakan, spesifikasi teknis atau volume barang/ jasa dan penetapan metode evaluasi pengadaan barang/jasa harus dicantumkan dalam dokumen pengadaan. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terdapat perubahan, maka dokumen tersebut dapat direvisi dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

Seperti yang tercantum dalam Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Sedangkan dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

Tata cara pengadaan barang/jasa tersebut dapat dilakukan dengan cara swakelola dan dapat pula dilakukan melalui penyedia barang/jasa. Dalam hal pengadaan dilakukan dengan melalui penyedia barang/jasa, metode pengadaan barang/jasa tersebut dibedakan berdasarkan jenis barang/jasa (jasa konstruksi, jasa konsultasi, barang, dan jasa lainnya).

Ketentuan pokok dalam penyusunan dokumen pengadaan menurut Rahayu (2011) dalam Putri (2014) antara lain:

- 1) Dokumen pengadaan disusun dan disiapkan panitia/pejabat pengadaan.
- 2) Isi harus lengkap dan jelas, serta tidak menimbulkan penafsiran jamak (multi tafsir).
- 3) Perubahan (adendum) dokumen diperkenankan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2.4 Pemahaman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2012 tentang sistem dan prosedur keuangan daerah pasal 1 menyebutkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah disusun dalam upaya terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah yang memenuhi asas tertib, transparan, akurat dan akuntabilitas.

Peraturan tersebut haruslah menjadi perhatian yang serius oleh manajer keuangan sektor publik karena dalam penganggaran terdapat hal penting yang harus diperhatikan yaitu sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik bertanggungjawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk melakukan perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati dan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya.

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. Ini berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD memiliki posisi strategis dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang akuntabel. Dan untuk dapat menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang system akuntansi dan pengelolaan keuangan (Tuasikal dalam Dewi, Sinarwati, dan Darmawan, 2014).

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu, ditemukan faktor-faktor yang secara signifikan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di beberapa wilayah di Indonesia. Menurut Herriyanto (2012), terdapat 5 faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja kementerian di wilayah jakarta yaitu faktor perencanaan, administrasi, SDM, dokumen pengadaan, dan ganti uang persediaan yang memiliki variasi total sebesar 71,43% sebagai penyebab terjadinya keterlambatan penyerapan anggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Priatno (2013) ditemukan bahwa faktor perencanaan dan faktor pengadaan barang dan jasa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran. Sedangkan faktor administrasi dan SDM tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran dikarenakan penetapan SK pejabat pengelola keuangan satuan kerja pada awal

tahun dan administrasi satuan kerja yang sudah baik, sehingga bisa menutup kekurangan pada faktor SDM pada satuan kerja. Pada penelitian Nugroho (2013) terdapat 6 faktor yang menjadi penyebab penumpukan pencairan dana yaitu perencanaan sebagai faktor yang paling berpengaruh diikuti faktor peraturan, SDM, teknis, kendala koordinasi dan pengadaan barang/jasa. Sedangkan penelitian Shalikhah (2014) memberikan kesimpulan bahwa faktor pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan, tekanan eksternal dan komitmen organisasi berdampak secara signifikan terhadap serapan anggaran.

Dari beberapa penelitian tersebut dapat diketahui terdapat beberapa faktor yang memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran. Secara umum faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran adalah faktor perencanaan, faktor administrasi, faktor dokumen/pengadaan barang dan jasa serta faktor sumber daya manusia (SDM). Dari keempat faktor tersebut, yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah faktor perencanaan, administrasi, dokumen/pengadaan barang dan jasa dan mengganti faktor SDM dengan faktor pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan. Penggantian ini dikarenakan apabila orang yang mengerti sistem dan prosedur pengelolaan keuangan maka dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan untuk menyusun laporan keuangan berpedoman pada prinsip dan standar yang berlaku (Shalikhah, 2014).

TABEL 2.1**PENELITIAN TERDAHULU**

No	Nama Peneliti	Analisis Data	Hasil
1	Herriyanto (2012)	Analisis Faktor Eksploratory (Exploratory Factor Analysis)	Menghasilkan 5 faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, yaitu: perencanaan, administrasi, SDM, dokumen pengadaan dan ganti uang persediaan.
2	Nugroho (2013)	Analisis Faktor	Menghasilkan 6 faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran, yaitu perencanaan, peraturan, SDM, teknis, kendala koordinasi, dan pengadaan barang dan jasa
3	Priatno (2013)	Analisis Faktor dan Analisis Regresi Logistik	Menghasilkan 2 faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu faktor perencanaan dan pengadaan barang dan jasa sedangkan faktor administasi dan sdm tidak memiliki pengaruh
4	Putri (2014)	Analisis Regresi Linear Berganda	Menghasilkan 3 faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu faktor SDM, dokumen pengadaan dan ganti uang persediaan. Sedangkan faktor perencanaan dan administrasi tidak memiliki pengaruh

5	Shalikhah (2014)	Analisis Regresi Linear Berganda	Menghasilkan 3 faktor yang mempengaruhi serapan anggaran yaitu pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan, komitmen organisasi dan tekanan eksternal
6.	Zarinah, M., Darwanis., Abdullah, S.	Analisis Regresi Linear Berganda	Menghasilkan 2 faktor yang mempengaruhi serapan anggaran yaitu faktor perencanaan dan sumber daya manusia.

2.3 Teori Birokrasi

Pengertian birokrasi menurut Max Weber dalam Basri (2009) adalah sistem kekuasaan, di mana pemimpin (superordinat) mempraktekkan kontrol atas bawahan (subordinat). Birokrasi menurut Mangkoesoebroto dalam Priatno (2013) dapat didefinisikan sebagai berbagai departemen yang menangani penyediaan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah. Setiap biro merupakan organisasi yang bukan bertujuan untuk mencari keuntungan yang dibiayai dengan memberikan gaji dan bukan dari penjualan output yang dihasilkannya. Setiap biro dalam melaksanakan tugas dapat saling bekerja sama (komplementer) atau bersaing dalam menggunakan sumber ekonomi yang langka.

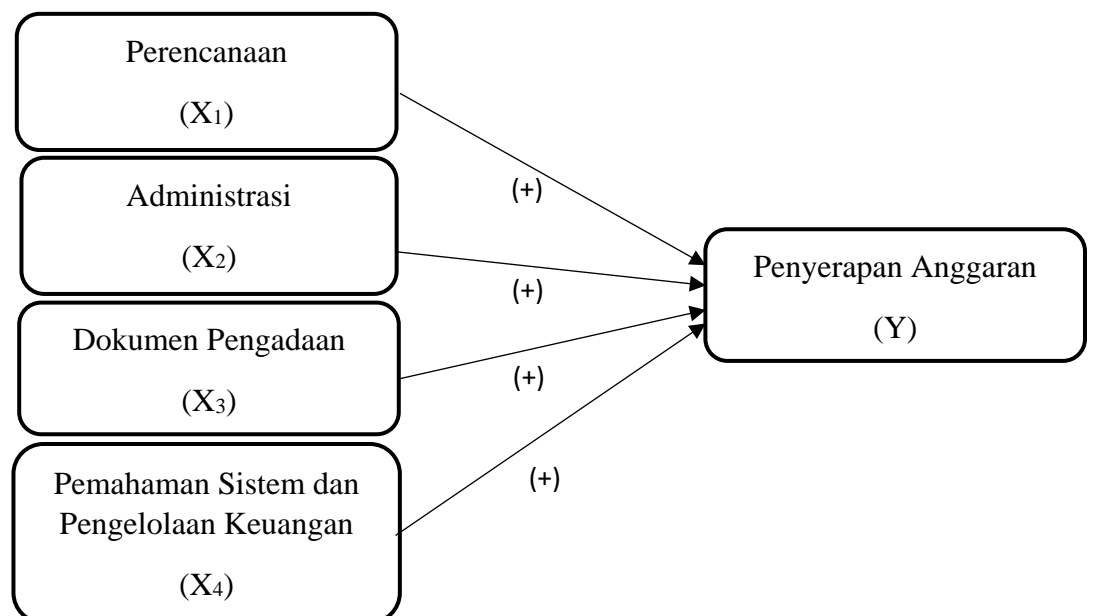
Sedangkan menurut Wakhid (2013) birokrasi tidaklah sama dengan pemerintahan. Ia mengatakan bahwa birokrasi (administrasi negara) merupakan alat negara yang perlu memiliki aturan main sendiri dan didukung oleh perundang-undangan tersendiri. Oleh sebab itu, hubungan antara birokrasi dan pemerintah harus diatur sedemikian rupa sehingga birokrasi bekerja untuk melayani negara dan

bukan kekuasaan. Birokrasi juga memegang peranan penting dalam perumusan, pelaksanaan dan pengawasan berbagai kebijakan publik, termasuk evaluasi kinerjanya.

Pemerintah merupakan bagian dari beberapa elemen yang membentuk tatanan masyarakat sosial. Sebagai wakil dari masyarakat, pemerintah memiliki peran penting dengan menetapkan kebijakan yang tepat guna. Kebijakan-kebijakan tersebut ditujukan untuk pembangunan, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Kemajuan dari suatu pembangunan salah satunya dapat dilihat dari peran pemerintah sebagai kekuasaan tertinggi dalam mengelola anggaran yang ada untuk kepentingan rakyat secara efektif dan efisien.

2.4 Model Penelitian

Rancangan pengujian hipotesis berdasarkan kerangka pemikiran adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Model Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

2.5.1 Perencanaan

Sesuai dengan fungsinya sebagai alat perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan membangun kepentingan masyarakat pada penyusunannya harus memperhitungkan kemungkinan rencana belanja dana yang baik digunakan secara efektif dan efisien.

Mardiasmo (2002) berpendapat bahwa perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Menurut Nugroho (2013) kelancaran serta keberhasilan organisasi untuk dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien ditentukan oleh adanya perencanaan yang matang. Perencanaan ini pada dasarnya merupakan salah satu fungsi dalam manajemen. Apabila manajemen keuangan publik tidak dapat merencanakan anggaran dengan baik, akan berdampak terhadap penyerapan anggaran dan juga kualitas penyediaan barang/jasa yang dihasilkan pemerintah.

Untuk itu, perencanaan dalam menyiapkan anggaran merupakan keharusan bagi setiap organisasi atau perusahaan. Perencanaan anggaran mengungkapkan apa yang akan dilakukan di masa datang dan menjadi proses bagi manajemen untuk berfikir tentang pengintegrasian aktivitas organisasional ke arah tujuan yang berorientasi kesasaran masa mendatang.

Herryanto (2012), Nugroho (2013) dan Priatno (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa faktor perencanaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan kajian dan penelitian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Perencanaan memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan anggaran

2.5.2 Administrasi

Secara luas administrasi adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan. Dalam suatu organisasi, apabila memiliki administrasi yang dirancang dan diterapkan dengan baik, maka akan berdampak dengan lancarnya kegiatan operasional organisasi tersebut. Pada organisasi sektor publik, diperlukan adanya administrasi yang baik dan jelas sehingga pejabat-pejabat pemerintahan dapat bekerja sesuai tugasnya serta agar tercapainya tujuan yaitu kelancaran penyerapan anggaran.

Menurut Gullick dalam Hakim (2011) di dalam proses penganggaran tidak terlepas dari administrasi karena penganggaran merupakan bagian fungsi dari administrasi yang berkaitan dengan cara merencanakan keuangan, berapa anggaran yang diperlukan, darimana pembiayaannya, perhitungan uang masuk dan keluarnya, pengawasan yang dilakukan, tata usaha, pencatatan dan pembukuan. Penganggaran adalah fungsi yang berkenaan dengan pengendalian organisasi melalui perencanaan fiskal dan akuntansi.

Herriyanto (2012) dan Putri (2014) dalam penelitiannya, menyatakan bahwa faktor administrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan kajian tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Administrasi memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan anggaran

2.5.3 Dokumen Pengadaan

Menurut Rum Riyanto melalui tulisannya mengenai pengadaan barang dan jasa menyatakan dalam menjalankan fungsi pemerintahan, sudah pasti dibutuhkan logistik, peralatan dan jasa yang menunjang optimalnya kerja instansi tersebut. Kebutuhan ini dapat dipenuhi oleh beberapa pihak, baik itu perusahaan milik pemerintah maupun swasta. Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di instansi dan perusahaan swasta, pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan lebih rumit karena berhubungan dengan perhitungan APBN/APBD yang digunakan untuk membayar barang atau jasa tersebut. Terlebih lagi ada beberapa aturan yang mengatur proses pengadaan barang yang tercantum dalam Perpres 54 tahun 2010 sebagai perubahan tentang tatacara pengadaan barang dan jasa pemerintah dari Keputusan Presiden No 8 tahun 2003.

Dokumen pengadaan sangat berpengaruh terhadap daya serap anggaran. Tanpa adanya dokumen pengadaan, proses pengadaan barang/jasa tidak dapat dilakukan sehingga akan memperlambat kegiatan/program yang telah direncanakan. Hal ini terlihat dari proses kualifikasi (baik barang dan jasa), pemilihan dan proses pencairan. Dokumen pengadaan berisi pengumuman mengenai lingkup pekerjaan, persyaratan peserta, waktu dan tempat pengambilan dan pemasukan dokumen, serta

penanggung jawab kegiatan pengadaan. Setiap kegiatan dalam penyediaan barang/jasa yang dimulai dari penyusunan hingga barang/jasa tersebut dapat digunakan, spesifikasi teknis atau volume barang/ jasa dan penetapan metode evaluasi pengadaan barang/jasa harus dicantumkan dalam dokumen pengadaan. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terdapat perubahan, maka dokumen tersebut dapat direvisi dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dalam penelitian yang dilakukan Herriyanto (2012), Nugroho (2013), Priatno (2013) dan Putri (2014) menunjukkan bahwa faktor pengadaan barang/jasa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan kajian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Dokumen pengadaan memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan anggaran

2.5.4 Pemahaman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2012 tentang sistem dan prosedur keuangan daerah pasal 1 menyebutkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah disusun dalam upaya terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah yang memenuhi asas tertib, transparan, akurat dan akuntabilitas.

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. Ini berarti pengelolaan keuangan daerah

yang tercermin dalam APBD memiliki posisi strategis dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang akuntabel. Dan untuk dapat menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang system akuntansi dan pengelolaan keuangan (Tuasikal dalam Dewi, Sinarwati, dan Darmawan, 2014).

Penelitian Shalikhah (2014) tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi serapan anggaran pada pemerintahan Kota Salatiga menunjukkan faktor pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap serapan anggaran. Berdasarkan kajian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan anggaran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kota Yogyakarta. Karena populasi yang sangat banyak sehingga tidak dimungkinkan untuk meneliti keseluruhan populasi, maka agar penelitian ini lebih efektif dilakukan pengambilan sampel dari populasi.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu memperoleh sampel dengan memenuhi kriteria tertentu yang dibutuhkan karakteristik sampling. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah SKPD dengan proyek/kegiatan kategori anggaran belanja modal tahun 2015 yang telah terealisasi sebesar 85% (angka tersebut berdasarkan rata-rata realisasi anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah kota Yogyakarta tahun 2015).

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner atau angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kuesioner yang tertutup karena responden hanya tinggal memberikan tanda pada salah satu jawaban yang dianggap benar. Responden dalam

penelitian adalah pejabat yang menduduki jabatan dibidang yang berkaitan dengan anggaran yaitu PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), PP SPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar) dan Bendahara Pengeluaran dimasing-masing SKPD.

3.3 Indikator Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Independen

Setiap variabel independen dibentuk oleh beberapa indikator pernyataan. Indikator-indikator tersebut diukur menggunakan skala likert mulai dari poin 1 yang menyatakan ‘Sangat Tidak Setuju’ sampai dengan poin 5 yang menyatakan ‘Sangat Setuju.

3.3.1.1 Faktor Perencanaan

Indikator pernyataan untuk faktor perencanaan dalam kuesioner penelitian ini terdiri dari: 1) Perencanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan (selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah); 2) Penetapan anggaran tepat waktu; 3) Pelaksanaan proyek melihat rencana/jadwal yang dibuat; 4) Waktu yang disediakan untuk penyusunan anggaran terbatas; 5) Terdapat program/kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

3.3.1.2 Faktor Administrasi

Indikator pernyataan untuk faktor administrasi dalam penelitian ini terdiri dari: 1) Paham terhadap peraturan mengenai mekanisme pembayaran; 2) Masa penyusunan dan penelaahan anggaran sudah sesuai; 3) Terdapat pejabat/pelaksana

pengadaan barang/jasa bersertifikat; 4) Terdapat tambahan pagu karena Anggaran Belanja Tambahan (ABT); 5) Salah dalam penentuan akun.

3.3.1.3 Faktor Dokumen Pengadaan

Indikator pernyataan untuk faktor dokumen pengadaan dalam penelitian ini terdiri dari: 1) Dapat menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 2) HPS ditentukan berdasarkan keahlian dan melalui survei pasar; 3) Penyusunan jadwal pelaksanaan lelang tepat waktu; 4) Pengesahan dokumen pengumuman lelang sesuai jadwal; 5) Terdapat mutasi pejabat/pegawai pengelola keuangan.

3.3.1.4 Faktor Pemahaman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Indikator pernyataan untuk faktor dokumen pengadaan dalam penelitian ini terdiri dari: 1) Mengetahui semua dokumen dan formulir yang digunakan dalam sistem akuntansi pemerintahan Kota Yogyakarta yang terkait dengan unit kerja; 2) Mampu menyusun Rencana Kerja dan Anggaran di SKPD terkait; 3) Dapat menjelaskan saat dan cara pencatatan atas transaksi keuangan pada SKPD terkait; 4) Dapat menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan tiap periode; 5) Memahami unsur pengendalian intern yang dimaksudkan untuk memonitoring/mengawasi pelaksanaan kegiatan.

3.3.2 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel terkait/yang dijelaskan oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penyerapan Anggaran. Adapun indikator pernyataan untuk variabel dependen yang terdiri dari: 1) Tingkat

penyerapan anggaran lebih dari 85%; 2) Penyerapan anggaran unit kerja sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat; 3) Tingkat penyerapan anggaran naik dari tahun sebelumnya.

3.4 Metode Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS (Statistical Package for Social Science) dengan tahapan-tahapan sebagai berikut.

3.4.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan *coefficient correlation pearson* yaitu dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor. Data dikatakan valid apabila korelasi antar skor masing-masing butir pernyataan dengan total skor setiap konstruksinya signifikan pada 0,05 atau 0,01 maka pernyataan tersebut dikatakan valid.

3.4.2 Uji Realibilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar suatu pengukuran mengukur dengan stabil atau konsisten (Ghozali, 2011). Instrumen

dipercaya jika jawaban dari responden atas pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Peneliti melakukan uji reliabilitas dengan menghitung Cronbach Alpha dari masing-masing item dalam suatu variabel. Instrumen yang dipakai dalam variabel dikatakan handal (*reliable*) apabila memiliki Cronbach Alpha $> 0,60$. Nilai Cronbach Alpha semakin mendekati angka 1 mengindikasikan bahwa instrumen semakin tinggi reliabilitasnya.

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Penggunaan metode analisis regresi linear berganda memerlukan uji asumsi klasik yang secara statistik harus dipenuhi. Asumsi klasik yang digunakan adalah asumsi normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

3.4.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov test dengan taraf signifikan 5%. Dasar pengambilan keputusan nilai Sig $\geq 0,05$ maka dikatakan berdistribusi normal. Jika nilai Sig $< 0,05$ maka dikatakan berdistribusi tidak normal.

3.4.3.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas pada dasarnya adalah adanya suatu hubungan linear yang sempurna (mendekati sempurna antara beberapa atau semua variabel bebas (Kuncoro, 2001). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat korelasi diantara variabel independen. Untuk mengetahui ada atau tidaknya

multikolinieritas di dalam model regresi, dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Jika *tolerance* diatas 0.10 dan nilai VIF dibawah 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas, dan begitu pula sebaliknya.

3.4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (nilai errornya). Model regresi yang baik adalah *Homoskedastisitas* bukan *Heteroskedastisitas*. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan uji Glejser. Pengujian ini membandingkan signifikansi dari uji tersebut terhadap α sebesar 5%.

3.4.4 Anallisa Regresi Linear Berganda

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan alat analisis statistik yakni analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh perencanaan (X1), pencatatan administrasi (X2), dokumen pengadaan (X3), dan Pemahaman Sistem dan Pengelolaan Keuangan (X4), terhadap penyerapan anggaran (Y). Analisa regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen dengan tujuan mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui.

Rumus regresi yang digunakan adalah :

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dalam hal ini adalah :

b_0 = Konstanta

X_1 = perencanaan anggaran

X_2 = pencatatan administrasi

X_3 = dokumen pengadaan

X_4 = pemahaman sistem dan pengelolaan keuangan

Y = penyerapan anggaran

b_1, b_2, b_3, b_4 = Koefisien regresi untuk X_1, X_2, X_3, X_4

e = error

3.4.5 Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. kriteria pengujian berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 (α), maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. jika lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

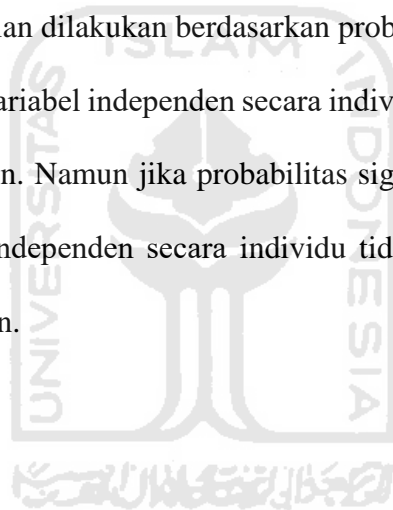
3.4.6 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sebaliknya apabila nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

3.4.7 Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh atau variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria pengujian dilakukan berdasarkan probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 (α), maka variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun jika probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 (α), maka variabel independen secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pengaruh perencanaan, administrasi, dokumen pengadaan serta pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan terhadap penyerapan anggaran. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari hasil jawaban responden melalui kuesioner. Hasil dari jawaban-jawaban responden ini akan menjadi informasi dalam menjawab permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

Pada bagian ini, peneliti membagi prosedur analisis menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Berisi hasil pengumpulan data yang menjelaskan jumlah data yang siap dianalisis.
2. Berisi hasil pengujian data agar dapat memenuhi syarat pengujian hipotesis.
3. Berisi pembahasan hasil penelitian yang berkaitan dengan uji hipotesis

4.1 Proses dan Hasil Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data telah dijelaskan sebelumnya pada bab tiga, yaitu dilakukan dengan mendatangi langsung ke masing-masing kantor dinas yang berada di pemerintahan kota Yogyakarta. Sebelumnya peneliti mengurus surat ijin penelitian di Dinas Perizinan pada tanggal 21 April 2016. Setelah mendapatkan

surat izin dan tebusan untuk masing-masing SKPD, peneliti memulai menyebarkan kuesioner penelitian dengan rentang waktu 21 April- 9 Mei 2016.

Total 60 kuesioner disebar ke 10 dinas pemerintah kota Yogyakarta dengan masing-masing dinas mendapatkan 6 kuesioner. Dengan tenggat waktu tiap-tiap dinas untuk mengisi kuesioner selama 1 minggu. Namun pada prosesnya seluruh kuesioner dapat dikumpulkan tanggal 2 Juni 2016 dikarenakan terdapat beberapa pejabat yang tidak berada ditempat saat kuesioner disebar. Hasil pengumpulan data yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	60	100%
Kuesioner yang tidak kembali	13	22%
Kuesioner yang kembali	47	78%
Kuesioner yang tidak memenuhi syarat	4	9%
Kuesioner yang memenuhi syarat	43	91%

Dari tabel 4.1 serta rincian kuisisioner yang telah diisi pada LAMPIRAN menunjukkan bahwa untuk 60 kuisisioner yang disebar, yang kembali dan layak untuk di analisis sejumlah 43 kuisisioner, dengan tingkat *useable response rate* 91%.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 43 responden sebagai objek penelitian, dapat diperoleh karakteristik umum responden yang meliputi jenis kelamin, tingkat pendidikan, lama bekerja dan jabatan. Pengklasifikasian responden berdasarkan karakteristik umum tersebut diperoleh untuk memperoleh

wawasan yang lebih luas mengenai objek penelitian. Data yang berhasil dihimpun dari 43 responden tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2

Rekapitulasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Pria	16	37%
Wanita	27	63%
Total	43	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2016

Berdasarkan tabel 4.2 diatas jumlah responden paling banyak adalah responden perempuan (63%), sedangkan responden laki – laki (37%).

Tabel 4.3

Rekapitulasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Responden	Presentase
S1	22	51%
S2	8	19%
S3	0	0%
Lainnya (D3, SMA, dsb)	13	30%
Total	43	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2016

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dari 43 responden yang diteliti, diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan S1 tinggi yaitu sebanyak 22 responden (51%), S2 sebanyak 8 responden (19%) dan lainnya sebanyak 13 responden (30%).

Tabel 4.4

Rekapitulasi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja	Responden	Presentase
< 5 tahun	1	2%
5-10 Tahun	7	16%
> 10 tahun	35	81%
Total	43	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2016

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dari 43 responden yang diteliti, diketahui bahwa paling banyak reponden yang bekerja lebih dari 10 tahun sebanyak 35 responden (81%), diikuti lama bekerja 5-10 tahun sebanyak 7 responden (16%) dan kurang dari 5 tahun dengan 1 orang responden (2%).

Tabel 4.5

Rekapitulasi Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Responden	Presentase
PPK	11	26%
PPTK	15	35%
Pegawai Verifikasi SPM/SPP	8	19%
Bendahara	9	21%
Total	43	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2016

Berdasarkan tabel 4.2 diatas jumlah responden paling banyak adalah responden yang memiliki jabatan PPTK sebesar 15 responden (35%), jabatan PPK 11 responden (26%), jabatan Bendahara 9 responden (21%) dan jabatan Pegawai Verifikasi SPM/SPP dengan 8 responden (19%).

4.2 Uji Instrumen Penelitian

4.2.1 Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan berdasarkan analisis item yaitu mengkorelasikan skor setiap item dengan skor variabel (hasil penjumlahan seluruh skor item pertanyaan). Teknik korelasinya memakai *Pearson Correlation*, dihitung dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 20. Item pertanyaan dinyatakan valid apabila memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Hasil uji validitas dengan metode *Pearson Correlation* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir	r-hitung	r-tabel	keterangan
Penyerapan Anggaran	PA1	0,793	0,248	Valid
	PA2	0,682		Valid
	PA3	0,606		Valid
Perencanaan	PR1	0,760		Valid
	PR2	0,896		Valid
	PR3	0,953		Valid
	PR4	0,924		Valid
	PR5	0,809		Valid
Administrasi	AD1	0,841		Valid
	AD2	0,849		Valid
	AD3	0,955		Valid
	AD4	0,947		Valid
	AD5	0,948		Valid
Dokumen Pengadaan	DP1	0,639		Valid
	DP2	0,874		Valid
	DP3	0,931	Valid	
	DP4	0,879	Valid	
	DP5	0,882	Valid	
Pemahaman Sistem	PSPK1	0,781	Valid	

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan	PSPK2	0,878	Valid
	PSPK3	0,947	Valid
	PSPK4	0,938	Valid
	PSPK5	0,925	Valid

Sumber: Hasil olah data, 2016

Seperti telah dikemukakan pada Tabel 4.6 diperoleh nilai r_{hitung} dari semua item pada validitas $> r_{tabel}$, maka butir-butir instrumen penelitian tersebut dinyatakan valid. Sehingga semua butir instrumen pertanyaan yang berhubungan dengan penyerapan anggaran, perencanaan, administrasi, dokumen pengadaan, serta pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dinyatakan valid sehingga pertanyaan-pertanyaan yang tertuang dalam angket penelitian dapat digunakan dalam penelitian.

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas

Reliabilitas berarti jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Semakin tinggi koefisien reliabilitas semakin reliabel jawaban yang diperoleh dari responden. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung besarnya nilai *Cronbachs Alpha* instrumen dari masing-masing variabel yang diuji. Apabila nilai *Cronbachs Coefficient Alpha* lebih besar dari 0,60, maka jawaban dari para responden pada kuesioner sebagai alat pengukur dinilai dinyatakan *reliabel*. Jika nilai *Cronbachs Coefficient Alpha* lebih kecil 0,60, maka jawaban dari para responden pada kuesioner sebagai alat pengukur dinilai dinyatakan tidak *reliable*. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach	Keterangan
Penyerapan Anggaran	0,823	Reliabel
Perencanaan	0,913	Reliabel
Administrasi	0,927	Reliabel
Dokumen Pengadaan	0,899	Reliabel
Pemahaman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan	0,944	Reliabel

Sumber: Hasil olah data, 2016

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas, diperoleh nilai *Cronbach Alpha* dari semua variabel penyerapan anggaran, perencanaan, administrasi, dokumen pengadaan, serta pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan menunjukkan lebih besar dari nilai 0,6. Dengan demikian jawaban-jawaban responden dari variabel-variabel penelitian tersebut reliabel, sehingga kuesioner dari variabel-variabel tersebut reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)*. Dasar pengambilan keputusan nilai $Sig \geq 0,05$ maka dikatakan berdistribusi normal. Jika nilai $Sig < 0,05$ maka dikatakan berdistribusi tidak normal. Berdasarkan Tabel 4.8 berikut ini dapat dilihat bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

Tabel 4.8

Hasil Uji Normalitas

Variabel	Asymp. Sig. (2 tailaed)	Keterangan
Penyerapan Anggaran	0,066	Normal
Perencanaan	0,810	Normal
Administrasi	0,189	Normal
Dokumen Pengadaan	0,710	Normal
Pemahaman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan	0,156	Normal

Sumber: Hasil olah data, 2016

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan yang bermakna(korelasi) antara setiap variabel bebas dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Multikoleniaritas dapat dilihat dari nilai *tolerance/variance inflation factor(VIF)*. Jika nilai *tolerance* > 0,1 dan atau *VIF* < 10, maka dapat dikatakan model telah bebas dari masalah multikolinearitas. Hasil dari uji multikolinearitas yang menunjukkan bahwa model uji tidak terdeteksi kasus multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9**Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Perencanaan	0,844	1,185	Bebas Multikolinieritas
Administrasi	0,906	1,103	Bebas Multikolinieritas
Dokumen Pengadaan	0,822	1,216	Bebas Multikolinieritas
Pemahaman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan	0,892	1,121	Bebas Multikolinieritas

Sumber: Hasil olah data, 2016

4.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji *glejser*. Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa tingkat signifikansi variabel bebas $\geq 0,05$ yang berarti bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi pada penelitian ini.

Tabel 4.10**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig	Keterangan
Perencanaan	0,408	Bebas Heteroskedastisitas
Administrasi	0,432	Bebas Heteroskedastisitas
Dokumen Pengadaan	0,324	Bebas Heteroskedastisitas
Pemahaman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan	0,989	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil olah data, 2016

4.4 Hasil Uji Hipotesis

4.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Model regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang terdiri dari perencanaan, administrasi, dokumen pengadaan, serta pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Yogyakarta. Hasil perhitungan regresi berganda dengan menggunakan program SPSS disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.11
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,594	1,446		2,486	,017
1 Perencanaan (X1)	,136	,049	,340	2,764	,009
Administrasi (X2)	,095	,038	,300	2,528	,016
Dokumen Pengadaan (X3)	,143	,051	,352	2,822	,008
Pemahaman Sistem dan Prosedur Keuangan (X4)	,080	,036	,269	2,252	,030

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran (Y)

Sumber: Hasil olah data, 2016

Dari tabel 4.11 ditunjukkan bahwa persamaan regresi ganda yang diperoleh dari hasil analisis adalah $Y_{\text{penyerapan anggaran}} = 3,594 + 0,136X_1 + 0,095X_2 + 0,143X_3 + 0,080X_4$. Dari persamaan regresi diatas diperoleh bahwa terdapat

hubungan yang positif antara X_1 dengan Y , terdapat hubungan positif antara X_2 dengan Y , terdapat hubungan positif antara X_3 dengan Y dan terdapat hubungan positif antara X_4 dengan Y . Sehingga dari persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 3,594 menyatakan bahwa nilai konstanta 3,594 akan menunjukkan nilai Y sebesar 3,594 dengan nilai X_1, X_2, X_3, X_4 konstan.
2. Koefisien regresi X_1 sebesar 0,136 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai X_1 akan meningkatkan Y sebesar 0,136.
3. Koefisien regresi X_2 sebesar 0,095 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai X_2 akan meningkatkan Y yaitu sebesar 0,095.
4. Koefisien regresi X_3 sebesar 0,143 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai X_3 akan meningkatkan Y sebesar 0,143.
5. Koefisien regresi X_4 sebesar 0,080 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai X_4 akan meningkatkan Y sebesar 0,080.

4.4.1.1 Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.12
Hasil Uji Statistik F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	25,438	4	6,359	10,067	,000 ^b
	Residual	24,004	38	,632		
	Total	49,442	42			

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran (Y)

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Sistem dan Prosedur Keuangan (X4), Perencanaan (X1), Administrasi (X2), Dokumen Pengadaan (X3)

Sumber: Hasil olah data, 2016

Hasil uji pada tabel 4.12 diperoleh nilai $F = 10,067$ dengan nilai signifikansi sebesar $P \text{ value} = 0,000$ yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa model penelitian yang digunakan dianggap layak uji dan keempat variabel mampu menjelaskan fenomena penyerapan anggaran pada SKPD di pemerintah kota Yogyakarta.

4.4.1.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Apabila mendekati nol maka variabel independen amat terbatas dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya apabila mendekati satu maka variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil dari koefisien determinasi penelitian ini.

Tabel 4.13

Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,717 ^a	,514	,463	,795

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Sistem dan Prosedur Keuangan (X4), Perencanaan (X1), Administrasi (X2), Dokumen Pengadaan (X3)

c. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran (Y)

Sumber: Hasil olah data, 2016

Dapat dilihat koefisien determinasi (R^2) dalam tabel diatas sebesar 0,463 yang bermakna bahwa tingkat penyerapan anggaran dipengaruhi oleh perencanaan, administrasi, dokumen pengadaan serta pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sebesar 46,3%, sedangkan 53,7% sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.4.1.3 Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria pengujian dilakukan berdasarkan probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 (α), maka variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh perencanaan, administrasi, dokumen pengadaan serta pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan terhadap penyerapan anggaran secara signifikan. Berikut hasil uji t ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.14

Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,594	1,446		2,486	,017
1 Perencanaan (X1)	,136	,049	,340	2,764	,009
Administrasi (X2)	,095	,038	,300	2,528	,016
Dokumen Pengadaan (X3)	,143	,051	,352	2,822	,008
Pemahaman Sistem dan Prosedur Keuangan (X4)	,080	,036	,269	2,252	,030

d. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran (Y)

Sumber: Hasil olah data, 2016

Tingkat signifikansi variabel perencanaan (0,009) kurang dari tingkat signifikan (0,05), maka dapat disimpulkan hipotesis 1 **diterima**. Hal ini membuktikan bahwa dokumen perencanaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dan memiliki arah pengaruh positif dengan nilai t-statistik 0,136. Hal ini berarti semakin baiknya perencanaan yang dibuat oleh SKPD di Pemerintah kota Yogyakarta mempengaruhi penyerapan anggaran, sehingga variabel perencanaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran.

Tingkat signifikansi variabel administrasi (0,016) kurang dari tingkat signifikan (0,05), maka dapat disimpulkan hipotesis 2 **diterima**. Hal ini membuktikan bahwa administrasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dan memiliki arah pengaruh positif dengan nilai t-statistik 0,095. Hal ini berarti semakin baiknya administrasi yang dimiliki oleh SKPD di Pemerintah Kota Yogyakarta

mempengaruhi penyerapan anggaran, sehingga variabel administrasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran.

Tingkat signifikansi variabel dokumen pengadaan (0,008) kurang dari tingkat signifikan (0,05), maka dapat disimpulkan hipotesis 3 **diterima**. Hal ini membuktikan bahwa dokumen pengadaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dan memiliki arah pengaruh positif dengan nilai t-statistik 0,143. Hal ini berarti semakin baiknya dokumen pengadaan yang dibuat oleh SKPD di Pemerintah Kota Yogyakarta mempengaruhi penyerapan anggaran, sehingga variabel dokumen pengadaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran.

Tingkat signifikansi variabel pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan (0,030) kurang dari tingkat signifikan (0,05), maka dapat disimpulkan hipotesis 4 **diterima**. Hal ini membuktikan bahwa pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dan memiliki arah pengaruh positif dengan nilai t-statistik 0,080. Hal ini berarti semakin baiknya pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yang dimiliki oleh SKPD di Pemerintah Kota Yogyakarta mempengaruhi penyerapan anggaran, sehingga variabel pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran.

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

4.5.1 Pengaruh Perencanaan Terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada uji parsial diperoleh hasil dengan tingkat signifikansi variabel perencanaan 0,009. Nilai tersebut kurang dari tingkat signifikan (0,05) ini membuktikan bahwa perencanaan berpengaruh

terhadap penyerapan anggaran dan memiliki arah pengaruh positif dengan nilai t-statistik 0,136. Hal ini berarti semakin baiknya perencanaan yang dibuat oleh SKPD di pemerintah Kota Yogyakarta, maka semakin tinggi pula tingkat penyerapan anggaran. Dengan demikian hipotesis pertama penelitian ini dapat diterima dan sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan di awal, yang menandakan bahwa perencanaan yang dimiliki pemerintah daerah sebagai wakil rakyat untuk mengelola anggaran telah baik sehingga berdampak baik pula terhadap penyerapan anggaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Priyatno (2013) yang menemukan bahwa perencanaan memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran. Namun, aspek perencanaan yang tidak matang dalam penentuan anggaran yang akan disajikan akan berdampak pada tidak akan berjalannya program kerja dengan baik, dikarenakan tidak selarasnya antara perencanaan anggaran dengan program kerja yang akan dilaksanakan dalam realisasi anggaran (Zarinah, Darwanis dan Abdullah, 2016). Penelitian Herriyanto (2012), dan Nugroho (2013) juga menemukan bahwa perencanaan anggaran mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran.

4.5.2 Pengaruh Administrasi Terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada uji parsial diperoleh hasil dengan tingkat signifikansi variabel administrasi 0,016. Nilai tersebut kurang dari tingkat signifikan (0,05) ini membuktikan bahwa administrasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dan memiliki arah pengaruh positif dengan nilai t-statistik 0,095. Hal ini berarti semakin baiknya administrasi yang dimiliki oleh

SKPD di pemerintah Kota Yogyakarta, maka semakin tinggi pula tingkat penyerapan anggaran. Dengan demikian hipotesis kedua penelitian ini dapat diterima dan sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan diawal, yang menandakan bahwa administrasi yang dimiliki pemerintah daerah sebagai wakil rakyat untuk mengelola anggaran telah berjalan dengan baik sehingga berdampak baik pula terhadap penyerapan anggaran.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Herriyanto (2012) yang menemukan bahwa administrasi memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran. Dalam proses penganggaran tidak terlepas dari administrasi karena penganggaran merupakan bagian fungsi dari administrasi yang berkaitan dengan cara merencanakan keuangan, berapa anggaran yang diperlukan, darimana pembiayaannya, perhitungan uang masuk dan keluarnya, pengawasan yang dilakukan, tata usaha, pencatatan dan pembukuan (Gullick dalam Hakim, 2011).

4.5.3 Pengaruh Dokumen Pengadaan Terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada uji parsial diperoleh hasil dengan tingkat signifikansi variabel dokumen pengadaan 0,008. Nilai tersebut kurang dari tingkat signifikan (0,05) ini membuktikan bahwa dokumen pengadaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dan memiliki arah pengaruh positif dengan nilai t-statistik 0,143. Hal ini berarti semakin baiknya dokumen pengadaan yang dibuat oleh SKPD di pemerintah Kota Yogyakarta, maka semakin tinggi pula tingkat penyerapan anggaran. Dengan demikian hipotesis ketiga penelitian ini dapat diterima dan sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan diawal, yang menandakan bahwa dokumen pengadaan yang dimiliki pemerintah daerah sebagai wakil rakyat

untuk mengelola anggaran telah baik sehingga tidak memperlambat jalannya pengadaan barang dan jasa dan berdampak baik terhadap penyerapan anggaran.

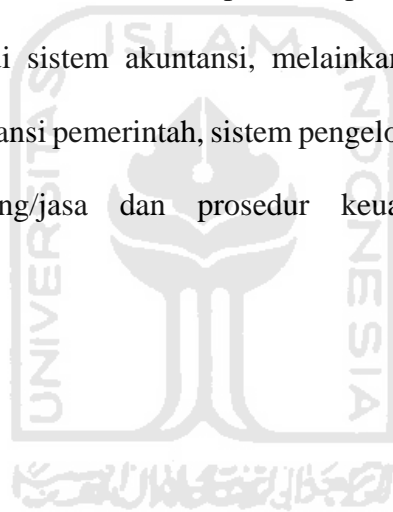
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Herriyanto (2012) yang menemukan bahwa dokumen pengadaan memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran. Dokumen pengadaan merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa. Didalamnya terdapat setiap kegiatan dalam penyediaan barang/jasa yang dimulai dari penyusunan hingga barang/jasa tersebut dapat digunakan, spesifikasi teknis atau volume barang/ jasa dan penetapan metode evaluasi pengadaan barang/jasa. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

4.5.4 Pengaruh Pemahaman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada uji parsial diperoleh hasil dengan tingkat signifikansi variabel pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan 0,030. Nilai tersebut kurang dari tingkat signifikan (0,05) ini membuktikan bahwa pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dan memiliki arah pengaruh positif dengan nilai t-statistik 0,080. Hal ini berarti semakin baiknya pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yang dimiliki oleh SKPD di pemerintah Kota Yogyakarta, maka akan semakin tinggi pula tingkat penyerapan anggaran. Dengan demikian hipotesis keempat penelitian ini dapat diterima dan sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan diawal, yang menandakan bahwa pemahaman sistem dan

prosedur pengelolaan keuangan pejabat pemerintah daerah sebagai wakil rakyat untuk mengelola anggaran telah baik sehingga berdampak baik pula terhadap penyerapan anggaran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Shalikhah (2014) yang menemukan adanya pengaruh pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan terhadap serapan anggaran. Dalam penjelasannya, untuk melaksanakan anggaran dan membuat kebijakan harus mempunyai pemahaman secara komprehensif. Pemahaman atas sistem dan prosedur pengelolaan keuangan bukan hanya sebatas mengetahui sistem akuntansi, melainkan harus mengetahui dan paham tentang sistem akuntansi pemerintah, sistem pengelolaan barang milik daerah, sistem pengadaan barang/jasa dan prosedur keuangan daerah sebelum melaksanakan kegiatan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah penyerapan anggaran dipengaruhi oleh faktor perencanaan, administrasi, dokumen pengadaan serta pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Variabel perencanaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan semakin baiknya perencanaan pada SKPD Kota Yogyakarta maka akan semakin meningkatkan tingkat penyerapan anggaran.
2. Variabel administrasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan semakin baiknya administrasi pada SKPD Kota Yogyakarta maka akan semakin meningkatkan tingkat penyerapan anggaran.
3. Variabel dokumen pengadaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan semakin baiknya dokumen pengadaan pada SKPD Kota Yogyakarta maka akan semakin meningkatkan tingkat penyerapan anggaran.
4. Variabel pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap penyerapan anggaran. Hal ini menunjukkan semakin baiknya pemahaman sistem dan prosedur

pengelolaan keuangan pada SKPD Kota Yogyakarta maka akan semakin meningkatkan tingkat penyerapan anggaran.

5.2 Implikasi Penelitian

5.2.1 Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta

Hasil penelitian ini menunjukkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Perencanaan, administrasi, dokumen pengadaan serta pemahaman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan merupakan faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran, oleh karena itu diharapkan bagi pemerintah Kota Yogyakarta untuk memperhatikan keempat faktor tersebut dalam menerapkan kebijakan-kebijakan anggarannya sehingga pelaksanaan anggaran dapat lebih efektif dan efisien serta tidak terjadi lagi penumpukan anggaran di akhir tahun atau anggaran yang masih sedikit terserap di awal tahun.

5.2.2 Bagi Kalangan Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan pada bidang akuntansi keuangan sektor publik serta mendukung berkembangnya penelitian pada anggaran pemerintah. Hal ini akan memberikan kesempatan serta peluang kepada peneliti-peneliti lain untuk mengembangkan penelitian dalam bidang penganggaran sektor publik.

5.2.3 Bagi Masyarakat Kota Yogyakarta

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai keuangan sektor publik khususnya pelaksanaan anggaran yang berjalan di pemerintah daerah.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Setelah melalui serangkaian perjalanan panjang dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menyadari bahwa penelitian ini belumlah sepenuhnya sempurna. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Keterbatasan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini mengambil data primer menggunakan kuesioner sehingga hanya berupa persepsi dari responden penelitian.
2. Peneliti tidak dapat melakukan proses pengumpulan data secara langsung kepada responden dikarenakan peneliti tidak memiliki hak akses secara penuh sehingga dalam proses pengumpulan data ini peneliti melalui pihak ketiga yaitu bagian sekretariat dimasing-masing SKPD sehingga data yang dikumpulkan tidak semuanya lengkap.

5.4 Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu berikut adalah beberapa saran bagi peneliti selanjutnya yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian dengan topik penelitian yang sama.

1. Penelitian selanjutnya akan lebih baik bila ditambahkan data sekunder untuk memperkuat hasil dari penelitian.
2. Proses pengumpulan data diusahakan secara langsung kepada responden agar memungkinkan tingkat pengumpulan data 100%. Apabila tidak mendapat ijin untuk melakukan pengumpulan data secara langsung kepada responden, disarankan untuk menyediakan kuesioner dengan melebihi

jumlah responden yang ada untuk mengantisipasi adanya kehilangan kuesioner yang dilakukan oleh petugas.



DAFTAR REFERENSI

- Akbarwati, I. Pentingnya Penyerapan Anggaran. Diambil pada 22 Januari 2016 dari <https://www.selasar.com/politik/pentingnya-penyerapan-anggaran>
- Basri, S. (2009). Konsep-konsep Birokrasi menurut Max Weber dan Martin Albrow. Diambil dari <http://setabasri01.blogspot.co.id/2009/05/pengantar.html>
- Falkhi. (2014). Perbedaan Administrasi dan Manajemen (Konsep, Filosofis, dan Implementasinya). Diambil dari <http://www.falkhi.com/2014/04/perbedaan-administrasi-dan-manajemen.html>
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariaet dengan Program IBM SPSS 19* (Edisi Lima). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hakim, A. R. (2011). Perbandingan antara Fungsi Manajemen POAC dengan POSDCORB. Diambil dari <https://arifcintaselvia.wordpress.com/kuliah/manajemen-publik/posdcorb/>
- Haryadi, H. (2009). *Administrasi Perkantoran untuk Manajer dan Staf* (Edisi pertama). Jakarta: Visimedia.
- Herriyanto, H. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Kementrian/Lembaga di Wilayah Jakarta*. Tesis S2 UI.
- Kuncoro, E. D. (2013). Analisis Penyerapan Anggaran Pasca Penerapan Aplikasi SiPP Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Dinas PU Prov. Kaltim. *eJournal Administrasi Bisnis*, 1 (4), hal. 364-373.
- Kuncoro, M. (2001). *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Mahsun, M., Sulistyowati, F., dan Purwanugraha, H. A. (2013). *Akuntansni Sektor Publik* (Edisi Ketiga). Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM.

- Nugroho, M. A. (2013). *Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penumpukan Pencairan Dana AOBN di Akhir Tahun*. Jurnal Skripsi S1 Universitas Brawijaya.
- Penyerapan APBD Yogyakarta Baru 84 Persen. (2015, 31 Desember). *Republika*. Diambil dari <http://keuda.kemendagri.go.id/berita/detail/2540-penyerapan-apbd-yogyakarta-baru-84-persen>
- Priatno, P. A. (2013). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar*. Jurnal Skripsi S1 Universitas Brawijaya.
- Putri, C. T. (2014). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu*. Skripsi S1 Universitas Bengkulu.
- Rusqiyati, E. A. (2016). Evaluasi Kinerja SKPD Pemkot Yogyakarta Dinilai Baik. *Antara Yogya*, diambil dari <http://jogja.antaranews.com/berita/337429/evaluasi-kinerja-skpd-pemkot-yogyakarta-dinilai-baik>
- Rendahnya Penyerapan Anggaran Daerah. (2015, 2 Desember). *Kedaulatan Rakyat online*, dari <http://krjogja.com/liputan-khusus/analisis/4285/rendahnya-penyerapan-anggaran-daerah.kr>
- Riswadi, P. (2013). Anggaran Sektor Publik. Diambil pada 22 Maret 2016, dari <http://pebiriswadi.blogspot.co.id/2013/04/anggaran-sektor-publik.html>
- Riyanto, R. S. Seputar Pengadaan Barang dan Jasa. Diambil pada 18 April 2016, dari <http://lpmpjateng.go.id/web/index.php/arsip/artikel/670-seputar-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah>
- Serapan Anggaran Pemkot Dijamin 'On The Track'. (2015, 4 November). *Kedaulatan Rakyat online*, diambil dari <http://krjogja.com/read/273271/serapan-anggaran-pemkot-dijamin-on-the-track.kr>
- Setiawanto, B. (2015, 7 November). Mengejar Optimalisasi Penyerapan Anggaran. *Sinar Indonesia*, diambil dari <http://hariansib.co/view/Opini/85022/Mengejar-Optimalisasi-Penyerapan-Anggaran.html#.VsUYuPJ97IV>

Shalikhah, L. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Serapan Anggaran Pada Pemerintahan Kota Salatiga*. Skripsi S1 UKSW.

Siswanto, A. D., dan Rahayu, S. L. (2010). *Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2010*.

Wakhid, A. A. (2013). Hubungan Pemerintah dan Birokrasi. *Jurnal TAPIS Vol.9 No.2*, Juli-Desember.

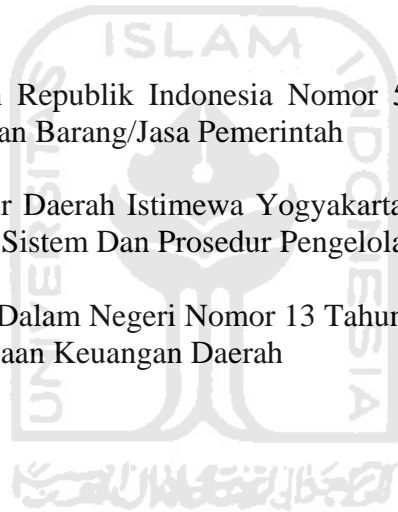
Zarinah, M., Darwanis., dan Abdullah, S. (2016). *Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Utara*. Jurnal Tesis S2 Unsyiah.

Undang-undang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

KUESIONER PENELITIAN

Kepada:

Yth. Bapak/Ibu/Saudara

Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan sebagai penunjang skripsi yang berjudul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta”**, yang disusun sebagai salah satu syarat kelulusan program S1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Kami memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner ini sangat berharga bagi keberhasilan penelitian ini dan seluruh jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara berikan akan dirahasiakan.

Atas bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 21 April 2016

Mengetahui,

(Dosen Pembimbing)

Peneliti

Johan Arifin S.E.,M.Si.Ph.D

Aucky Nararya Muhammad

DAFTAR KUESIONER PENELITIAN

Bapak/Ibu/Saudara dimohon dengan hormat untuk mengisi identitas secara lengkap dan memberi tanda silang (x) pada jawaban yang menggambarkan kondisi Bapak/Ibu /Saudara.

Setiap pertanyaan mohon diisi hanya dengan satu jawaban

1. Nama :
2. Jenis kelamin : a. Pria b. Wanita
3. Usia :
4. Pendidikan terakhir : a. S1 b. S2 c. S3
Lainnya.....
5. Instansi/Satuan Kerja :
6. Unit Kerja : a. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
b. PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)
c. Pegawai Verifikasi SPM/SPP
d. Bendahara
7. Kabupaten/Kota/Provinsi :
8. Lama menjabat.....tahun.....bulan
9. Lama bekerja.....tahun.....bulan

Survei ini bersifat akademik, data/informasi yang dikumpulkan semata-mata untuk tujuan statistik dan tidak dipublikasikan.

Petunjuk:

Dimohon untuk memberi tanda centang (\checkmark) pada jawaban yang sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu/Saudara berdasarkan keterangan nilai seperti dibawah ini:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS: Tidak Setuju

N : Netral/ Ragu-ragu

S : Setuju

SS: Sangat Setuju

Penyerapan Anggaran

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Tingkat penyerapan anggaran lebih dari 85%.					
2.	Penyerapan anggaran unit kerja sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.					
3.	Tingkat penyerapan anggaran naik dari tahun sebelumnya.					

Perencanaan

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Perencanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan (selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).					
2.	Penetapan anggaran tepat waktu.					
3.	Pelaksanaan proyek melihat rencana/jadwal yang dibuat.					
4.	Waktu yang disediakan untuk penyusunan anggaran terbatas.					

5.	Terdapat program/kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.					
----	--	--	--	--	--	--

Administrasi

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Paham terhadap peraturan mengenai mekanisme pembayaran.					
2.	Masa penyusunan dan penelaahan anggaran sudah sesuai.					
3.	Terdapat mutasi pejabat/pegawai pengelola keuangan.					
4.	Terdapat tambahan pagu karena Anggaran Belanja Tambahan (ABT).					
5.	Salah dalam penentuan akun.					

Dokumen Pengadaan

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Dapat menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)					
2.	HPS ditentukan berdasarkan keahlian dan melalui survei pasar.					
3.	Penyusunan jadwal pelaksanaan lelang tepat waktu.					
4.	Pengesahan dokumen pengumuman lelang sesuai jadwal.					
5.	Terdapat pejabat/pelaksana pengadaan barang/jasa bersertifikat.					

Pemahaman Sistem dan Pengelolaan Keuangan

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Mengetahui semua dokumen dan formulir yang digunakan dalam sistem akuntansi pemerintahan Kota Yogyakarta yang terkait dengan unit kerja.					
2.	Mampu menyusun Rencana Kerja dan Anggaran di SKPD terkait.					
3.	Dapat menjelaskan saat dan cara pencatatan atas transaksi keuangan pada SKPD terkait.					
4.	Dapat menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan tiap periode.					
5.	Memahami unsur pengendalian intern yang dimaksudkan untuk memonitoring/mengawasi pelaksanaan kegiatan.					

Lampiran 2

Daftar Rekapitulasi Jawaban Responden

Resp	Perencanaan (X1)						Administrasi (X2)					Total AD
	PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	Total PR	AD1	AD2	AD3	AD4	AD5	
1	5	5	4	4	3	21	4	4	3	3	2	16
2	4	4	4	3	3	18	4	4	4	4	3	19
3	4	4	4	3	3	18	5	5	5	5	5	25
4	5	5	5	5	4	24	4	4	4	3	3	18
5	4	4	4	3	3	18	4	4	4	3	3	18
6	4	4	4	3	3	18	4	4	4	3	3	18
7	4	4	4	3	3	18	4	4	4	3	3	18
8	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
9	5	5	5	4	4	23	4	4	4	4	3	19
10	4	4	4	4	4	20	4	4	4	3	3	18
11	4	4	4	4	4	20	4	4	3	3	2	16
12	4	3	3	2	2	14	4	4	4	3	3	18
13	4	4	4	4	4	20	4	4	3	2	2	15
14	4	4	3	3	2	16	4	4	3	2	2	15
15	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
16	3	3	3	3	3	15	5	5	5	5	4	24
17	4	4	4	4	4	20	5	5	5	5	5	25
18	4	4	4	4	4	20	5	5	5	4	4	23
19	5	4	4	4	4	21	5	5	5	5	5	25
20	5	5	5	5	4	24	4	4	4	4	4	20
21	4	4	4	4	4	20	5	5	5	5	5	25
22	4	4	4	4	3	19	4	4	3	2	2	15
23	4	4	4	4	3	19	4	4	4	4	4	20
24	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	3	19
25	5	5	5	4	4	23	5	5	5	5	5	25
26	4	4	4	4	3	19	4	4	3	3	2	16
27	4	4	4	4	3	19	4	4	4	4	4	20
28	4	4	3	3	2	16	4	3	3	3	3	16
29	4	3	3	2	2	14	4	3	2	2	2	13
30	4	4	4	4	4	20	4	4	4	3	3	18
31	4	4	4	4	4	20	5	5	5	4	4	23
32	4	3	3	2	2	14	4	4	4	3	3	18
33	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
34	4	4	3	3	2	16	4	3	3	2	2	14
35	4	4	4	4	4	20	4	4	3	3	2	16
36	3	3	3	3	3	15	4	4	4	4	4	20
37	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
38	4	4	4	4	4	20	5	5	5	5	5	25
39	3	3	3	3	3	15	4	3	3	3	3	16
40	5	5	5	5	4	24	4	4	3	3	2	16

41	4	4	4	4	4	20	4	4	3	2	2	15
42	4	4	4	4	3	19	4	4	3	2	2	15
43	5	5	5	5	4	24	4	4	4	3	3	18
Dokumen Pengadaan (X3)						Pemahaman Sistem dan Prosedur Keuangan (X4)						
DP1	DP2	DP3	DP4	DP5	Total DP	PSPK1	PSPK2	PSPK3	PSPK4	PSPK5	Total PSPK	
5	5	4	4	3	21	4	4	4	4	3	19	
4	4	3	3	2	16	5	4	4	4	4	21	
4	3	3	3	3	16	5	4	4	4	4	21	
5	5	5	4	4	23	4	3	2	2	2	13	
5	4	4	4	4	21	4	4	4	4	3	19	
4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	3	19	
4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	3	19	
4	4	4	3	3	18	4	4	4	4	4	20	
5	5	5	5	5	25	4	3	2	2	2	13	
4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	19	
4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	3	19	
4	3	3	3	2	15	5	5	5	5	5	25	
4	4	4	4	4	20	4	4	4	3	3	18	
4	4	4	4	3	19	5	5	5	4	4	23	
4	3	3	2	2	14	4	4	3	3	2	16	
5	5	5	4	4	23	4	3	2	2	2	13	
5	4	4	4	4	21	5	5	5	5	4	24	
4	5	4	4	4	21	5	5	5	5	4	24	
4	4	4	3	3	18	5	5	5	5	4	24	
4	4	4	4	4	20	5	4	4	4	4	21	
5	5	5	4	4	23	5	5	5	5	5	25	
4	4	4	4	3	19	5	5	5	4	4	23	
5	5	5	4	4	23	4	3	2	2	2	13	
4	3	2	2	2	13	4	3	3	3	2	15	
4	5	4	4	3	20	4	4	4	4	3	19	
4	4	4	4	3	19	4	4	3	3	2	16	
4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	3	19	
4	5	4	4	4	21	4	4	3	3	2	16	
4	4	4	3	3	18	4	3	3	3	3	21	
4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	
4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	3	19	
4	3	3	3	2	15	5	5	5	5	5	25	
4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	3	19	
4	4	4	4	3	19	4	4	3	3	2	16	
4	3	3	2	2	14	4	4	4	4	3	19	
5	4	4	4	3	20	4	3	3	2	2	14	
5	4	4	4	4	21	5	5	5	5	4	24	
4	5	4	4	4	21	5	4	4	4	4	21	
4	4	4	3	3	18	4	4	4	4	3	19	
4	4	4	4	4	20	5	5	5	5	4	24	
5	5	5	4	4	23	5	4	4	4	4	21	
4	4	4	4	3	19	4	4	3	3	2	16	
5	5	5	4	4	23	4	3	2	2	2	13	

Penyerapan Anggaran (Y)			
PA1	PA2	PA3	Total PA
5	4	4	13
4	4	4	12
4	4	4	12
5	4	4	13
4	4	4	12
4	4	4	12
4	4	4	12
5	4	4	13
5	4	4	13
4	4	4	12
4	4	4	12
4	4	3	11
4	4	4	12
4	4	3	11
4	3	3	13
4	3	3	13
5	5	4	14
5	5	4	14
5	5	4	14
5	5	4	13
5	5	4	13
4	4	4	12
4	4	4	12
4	4	3	11
5	4	4	13
4	4	4	12
4	4	3	11
4	4	4	12
3	3	2	11
4	4	4	12
4	4	4	12
4	4	3	11
4	4	4	12
4	3	3	10
4	3	3	10
4	4	3	11
5	5	4	14
5	5	4	14
5	5	4	14
5	5	4	14
5	4	4	13
4	4	4	12
5	4	4	13



Lampiran 3

Daftar Nama SKPD

No	Nama SKPD	Jumlah Kuesioner yang dibagikan	Jumlah kuesioner yang kembali	Jumlah kuesioner yang diolah
1	BAPPEDA	6	4	4
2	Dinas Perizinan	6	5	4
3	Dinas Kimpraswil	6	3	3
4	Dinas Sosnakertrans	6	4	4
5	Dinas Perindagkoptan	6	4	4
6	Dinas Dukcapil	6	5	4
7	Dinas Pendidikan	6	6	6
8	Dinas Ketertiban	6	5	5
9	Dinas Perhubungan	6	6	5
10	DPDPK	6	5	4
Total		60	47	43

Daftar Informasi Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
P	16	37%
W	27	63%
Total	43	100%
Pendidikan		
S1	22	51%
S2	8	19%
S3		0%
Lainnya	13	30%
Total	43	100%
Lama Bekerja		
< 5 tahun	1	2%
5-10 Tahun	7	16%
> 10 tahun	35	81%
Total	43	100%
Jabatan		
PPK	11	26%
PPTK	15	35%
Pegawai Verif	8	19%
Bendahara	9	21%
Total	43	100%

Lampiran 4

Hasil Uji Validitas

Hasil Uji Validitas Variabel Perencanaan (X1)

Correlations

		PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	Perencanaan (X1)
PR1	Pearson Correlation	1	,850**	,753**	,549**	,330*	,760**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,031	,000
	N	43	43	43	43	43	43
PR2	Pearson Correlation	,850**	1	,871**	,769**	,506**	,896**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,001	,000
	N	43	43	43	43	43	43
PR3	Pearson Correlation	,753**	,871**	1	,817**	,726**	,953**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	43	43	43	43	43	43
PR4	Pearson Correlation	,549**	,769**	,817**	1	,800**	,924**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	43	43	43	43	43	43
PR5	Pearson Correlation	,330*	,506**	,726**	,800**	1	,809**
	Sig. (2-tailed)	,031	,001	,000	,000		,000
	N	43	43	43	43	43	43
Perencanaan (X1)	Pearson Correlation	,760**	,896**	,953**	,924**	,809**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	43	43	43	43	43	43

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil Uji Validitas Variabel Administrasi (X2)

Correlations

		AD1	AD2	AD3	AD4	AD5	Administrasi (X2)
AD1	Pearson Correlation	1	,846**	,766**	,712**	,716**	,841**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	43	43	43	43	43	43
AD2	Pearson Correlation	,846**	1	,831**	,715**	,671**	,849**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	43	43	43	43	43	43
AD3	Pearson Correlation	,766**	,831**	1	,859**	,886**	,955**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	43	43	43	43	43	43
AD4	Pearson Correlation	,712**	,715**	,859**	1	,916**	,947**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	43	43	43	43	43	43
AD5	Pearson Correlation	,716**	,671**	,886**	,916**	1	,948**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	43	43	43	43	43	43
Administrasi (X2)	Pearson Correlation	,841**	,849**	,955**	,947**	,948**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	43	43	43	43	43	43

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Validitas Variabel Dokumen Pengadaan (X3)

Correlations

		DP1	DP2	DP3	DP4	DP5	Dokumen Pengadaan (X3)
DP1	Pearson Correlation	1	,519**	,601**	,381*	,391**	,639**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,012	,010	,000
	N	43	43	43	43	43	43
DP2	Pearson Correlation	,519**	1	,828**	,690**	,650**	,874**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000

DP3	N	43	43	43	43	43	43
	Pearson Correlation	,601**	,828**	1	,746**	,756**	,931**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
DP4	N	43	43	43	43	43	43
	Pearson Correlation	,381*	,690**	,746**	1	,817**	,879**
	Sig. (2-tailed)	,012	,000	,000		,000	,000
DP5	N	43	43	43	43	43	43
	Pearson Correlation	,391**	,650**	,756**	,817**	1	,882**
	Sig. (2-tailed)	,010	,000	,000	,000		,000
Dokumen Pengadaan (X3)	N	43	43	43	43	43	43
	Pearson Correlation	,639**	,874**	,931**	,879**	,882**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	43	43	43	43	43	43

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Sistem dan Prosedur Keuangan (X4)

Correlations

		PSPK1	PSPK2	PSPK3	PSPK4	PSPK5	Pemahaman Sistem dan Prosedur Keuangan (X4)
PSPK1	Pearson Correlation	1	,703**	,677**	,644**	,780**	,781**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	43	43	43	43	43	43
PSPK2	Pearson Correlation	,703**	1	,914**	,881**	,760**	,878**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	43	43	43	43	43	43
PSPK3	Pearson Correlation	,677**	,914**	1	,950**	,860**	,947**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	43	43	43	43	43	43
PSPK4	Pearson Correlation	,644**	,881**	,950**	1	,854**	,938**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000

PSPK5	N	43	43	43	43	43	43
	Pearson Correlation	,780**	,760**	,860**	,854**	1	,925**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
Pemahaman Sistem dan Prosedur Keuangan (X4)	N	43	43	43	43	43	43
	Pearson Correlation	,781**	,878**	,947**	,938**	,925**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	43	43	43	43	43	43

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Validitas Variabel Penyerapan Anggaran (Y)

Correlations

		PA1	PA2	PA3	Penyerapan Anggaran (Y)
PA1	Pearson Correlation	1	,679**	,553**	,793**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	43	43	43	43
PA2	Pearson Correlation	,679**	1	,591**	,682**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	43	43	43	43
PA3	Pearson Correlation	,553**	,591**	1	,606**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
	N	43	43	43	43
Penyerapan Anggaran (Y)	Pearson Correlation	,793**	,682**	,606**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	43	43	43	43

Lampiran 5

Hasil Uji Reliabilitas

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Perencanaan (X1)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	43	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	43	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,913	5

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Administrasi (X2)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	43	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	43	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,927	5

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Dokumen Pengadaan (X3)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	43	100,0
	Excluded ^a	0	,0

Total	43	100,0
-------	----	-------

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,899	5

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pemahaman Sistem dan Prosedur Keuangan (X4)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	43	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	43	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,944	5

Hasil Uji Validitas Variabel Penyerapan Anggaran (Y)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	43	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	43	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,823	3

Lampiran 6

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas (NPar Tests)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Perencanaan (X1)	Administrasi (X2)	Dokumen Pengadaan (X3)
N		43	43	43
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	19,16	18,91	19,53
	Std. Deviation	2,716	3,428	2,676
Most Extreme Differences	Absolute	,193	,166	,197
	Positive	,193	,166	,129
	Negative	-,179	-,102	-,197
Kolmogorov-Smirnov Z		1,265	1,086	1,291
Asymp. Sig. (2-tailed)		,081	,189	,071

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Pemahaman Sistem dan Prosedur Keuangan (X4)	Penyerapan Anggaran (Y)
N		43	43
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	19,23	12,33
	Std. Deviation	3,637	1,085
Most Extreme Differences	Absolute	,172	,199
	Positive	,107	,199
	Negative	-,172	-,173
Kolmogorov-Smirnov Z		1,129	1,307
Asymp. Sig. (2-tailed)		,156	,066

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
Perencanaan (X1)	,844	1,185
Administrasi (X2)	,906	1,103
Dokumen Pengadaan (X3)	,822	1,216
Pemahaman Sistem dan Prosedur Keuangan (X4)	,892	1,121

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran (Y)

Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Uji Glejser

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
(Constant)	1,341	,927		1,446	,156
Perencanaan (X1)	-,026	,032	-,143	-,837	,408
Administrasi (X2)	,019	,024	,131	,795	,432
Dokumen Pengadaan (X3)	-,032	,032	-,172	-1,000	,324
Pemahaman Sistem dan Prosedur Keuangan (X4)	,000	,023	-,002	-,014	,989

a. Dependent Variable: AbsUt

Lampiran 7

Hasil Analisis Regresi Berganda

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pemahaman Sistem dan Prosedur Keuangan (X4), Perencanaan (X1), Administrasi (X2), Dokumen Pengadaan (X3) ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran (Y)

b. All requested variables entered.

Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,717 ^a	,514	,463	,795

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Sistem dan Prosedur Keuangan (X4), Perencanaan (X1), Administrasi (X2), Dokumen Pengadaan (X3)

Uji Simultan (Statistik F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	25,438	4	6,359	10,067	,000 ^b
	Residual	24,004	38	,632		
	Total	49,442	42			

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran (Y)

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Sistem dan Prosedur Keuangan (X4), Perencanaan (X1), Administrasi (X2), Dokumen Pengadaan (X3)

Uji Parsial (Statistik t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,594	1,446		2,486	,017
1 Perencanaan (X1)	,136	,049	,340	2,764	,009
Administrasi (X2)	,095	,038	,300	2,528	,016
Dokumen Pengadaan (X3)	,143	,051	,352	2,822	,008
Pemahaman Sistem dan Prosedur Keuangan (X4)	,080	,036	,269	2,252	,030

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran (Y)

